

Refleksi Komparatif Implementasi ESG di Indonesia dan Vietnam: Tantangan, Kebijakan, Prospek

**Andi Setyo Pambudi, Alan Yazid Ali Basjah, Hasan Ashari, Eddy Rusman, Isti Yuli
Ismawati, Yudhi Putro**

Perbanas Institute, Indonesia

Email: yudhi.putro05@perbanas.id

Abstrak

Fenomena pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara memperlihatkan kompleksitas yang signifikan, khususnya di Indonesia dan Vietnam yang menghadapi tekanan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kedua negara berhadapan dengan degradasi hutan, polusi plastik, risiko greenwashing, dan keterbatasan kapasitas UMKM, meski juga menunjukkan capaian progresif seperti percepatan energi surya di Vietnam dan penerbitan green sukuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif implementasi ESG dengan fokus pada lima isu utama: pelajaran transisi energi terbarukan, desain kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), tata kelola hutan dan kepatuhan rantai pasok terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR), standar pelaporan global dalam pencegahan greenwashing, serta integrasi UMKM dalam kerangka keberlanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya tuntutan global terhadap transparansi dan kredibilitas ESG serta kebutuhan pembelajaran lintas negara untuk memperkuat daya saing. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif komparatif melalui telaah literatur, analisis kebijakan, dan triangulasi sumber dari publikasi akademik serta laporan internasional. Hasil analisis merekomendasikan penguatan insentif energi terbarukan yang terukur, harmonisasi kebijakan EPR lintas negara, pusat kepatuhan EUDR regional, adopsi standar ISSB S1/S2, serta program pembiayaan dan pelaporan proporsional bagi UMKM. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ESG lintas negara sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat transformasi keberlanjutan di kawasan.

Kata kunci: ESG, energi terbarukan, EPR, greenwashing, UMKM, Indonesia, Vietnam

Abstract

The dynamics of sustainable development in Southeast Asia highlight the multifaceted challenges of environmental, social, and governance (ESG) practices, particularly in Indonesia and Vietnam. Both countries face persistent issues such as deforestation, plastic pollution, risks of greenwashing, and limited SME capacity, while also demonstrating progressive achievements such as Vietnam's solar boom and Indonesia's issuance of green sukuk. This study aims to comparatively analyze ESG implementation across five critical domains: lessons from renewable energy transition, the design of Extended Producer Responsibility (EPR) policies, forest governance and supply chain compliance with the European Union Deforestation Regulation (EUDR), global reporting standards in mitigating greenwashing, and the integration of SMEs into sustainability frameworks. The urgency of this research lies in the growing global demand for credible ESG disclosure and the need for cross-country learning to strengthen competitiveness. Employing a qualitative comparative approach, the study draws on literature review, policy analysis, and source triangulation from academic publications and international reports. The findings recommend calibrated renewable energy incentives, cross-border harmonization of EPR, regional EUDR compliance hubs, adoption of ISSB S1/S2 standards, and tailored SME financing and reporting schemes. This study contributes to ESG scholarship in emerging economies while offering practical recommendations to enhance sustainable transformation in the region.

Keywords: ESG, renewable energy, EPR, greenwashing, SMEs, Indonesia, Vietnam

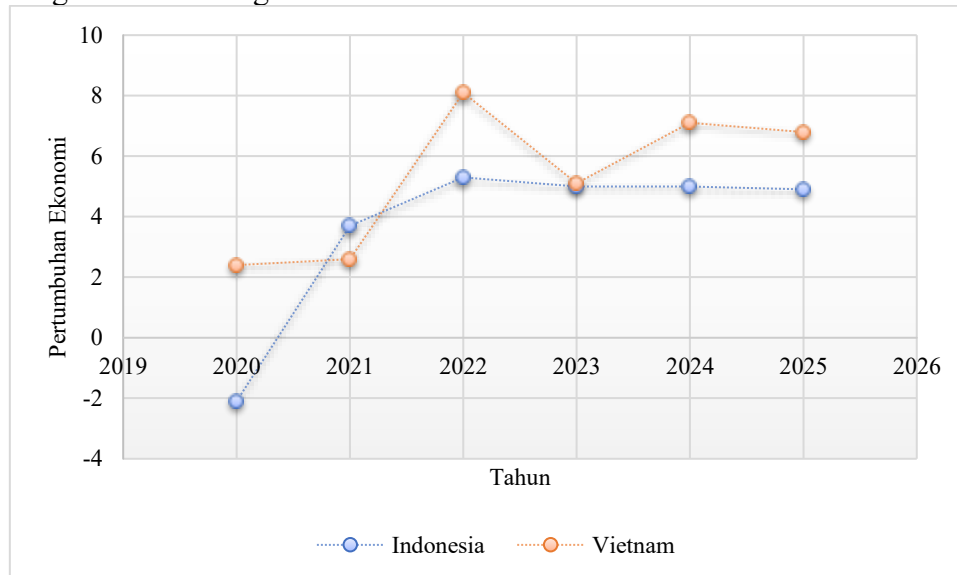
Corresponding: Yudhi Putro
E-mail: yudhi.putro05@perbanas.id



PENDAHULUAN

Fenomena pembangunan berkelanjutan semakin menuntut perhatian negara-negara di dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi berbagai tekanan struktural dalam dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Indonesia dan Vietnam, sebagai

dua negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sekaligus kaya akan sumber daya alam, menghadapi dilema besar dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada prinsip *environmental, social, and governance (ESG)*. Grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Vietnam 2020–2025 memperlihatkan dinamika pemulihan pasca-pandemi dan arah pembangunan kedua negara.



Gambar 1. Potret Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Vietnam Periode 2020-2025

Sumber: OECD, 2025; World Bank, 2025

Indonesia mengalami kontraksi $-2,1\%$ pada 2020, lalu pulih stabil di kisaran 5% sepanjang 2021–2024 dengan proyeksi $4,9\%$ pada 2025. Sebaliknya, Vietnam tetap tumbuh positif pada 2020 sebesar $2,4\%$, kemudian melesat $8,1\%$ pada 2022, meski sempat melambat ke $5,1\%$ pada 2023. Proyeksi 2024–2025 menunjukkan Vietnam mempertahankan momentum tinggi $6,8\text{--}7,1\%$, jauh di atas Indonesia. Artinya, Indonesia lebih stabil tetapi moderat, sementara Vietnam lebih fluktuatif namun agresif. Grafik ini mencerminkan perbedaan strategi: komoditas di Indonesia versus manufaktur ekspor di Vietnam.

Pada sisi lain, kedua negara berhadapan dengan tantangan lingkungan hidup yang berupa kehilangan hutan primer, polusi plastik, dan meningkatnya emisi karbon. Indonesia, misalnya, menghadapi tekanan akibat deforestasi yang erat kaitannya dengan ekspansi perkebunan dan industri ekstraktif (Nugroho & Daspar, 2025). Vancutsem et al. (2021) mencatat tren deforestasi global yang signifikan pada periode 2001–2020, dan Indonesia menjadi salah satu kontributor utama. Meski demikian, terdapat indikasi perbaikan dengan menurunnya angka deforestasi dalam beberapa tahun terakhir berkat moratorium izin baru dan program restorasi ekosistem (Global Forest Watch, 2025). Di sisi lain, Vietnam mencatat capaian luar biasa dalam transisi energi dengan percepatan adopsi energi surya yang sangat pesat pada 2020–2021 berkat kebijakan *feed-in tariff*. Namun, kebijakan yang agresif ini juga menimbulkan persoalan baru berupa kelebihan pasokan, risiko finansial bagi perusahaan utilitas, serta keterbatasan infrastruktur jaringan (Ngo et al., 2024).

Dari sisi sosial, kedua negara menghadapi tuntutan untuk mendorong inklusivitas, khususnya peran UMKM dan kesetaraan gender dalam ekosistem keberlanjutan. Keberadaan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi, baik di Indonesia maupun Vietnam, dengan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Namun, keterlibatan UMKM dalam implementasi ESG masih terbatas karena kapasitas internal yang rendah, akses pembiayaan yang tidak memadai, dan kompleksitas pelaporan yang seringkali dianggap membebani (Uong

& Nguyen, 2025). Padahal, pengarusutamaan UMKM dalam kerangka ESG merupakan prasyarat penting untuk mencapai keberlanjutan yang inklusif.

Dimensi tata kelola tidak kalah penting. Standar global seperti *International Sustainability Standards Board* (ISSB S1/S2) menuntut perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. Instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green sukuk* juga mulai diadopsi untuk membiayai proyek-proyek hijau. Indonesia menjadi pelopor di kawasan dengan penerbitan *green sukuk* sejak 2018 yang dimaksudkan untuk mendanai proyek energi terbarukan, konservasi, dan transportasi rendah karbon (Daniela et al., 2022). Sementara itu, Vietnam masih berada dalam tahap akselerasi dengan fokus pada pengungkapan ESG yang terbatas pada sektor tertentu, terutama UMKM (Uong & Nguyen, 2025). Regulasi internasional, seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), juga menambah kompleksitas karena menuntut kepatuhan rantai pasok bebas deforestasi dari negara eksportir komoditas tropis, termasuk Indonesia dan Vietnam. Situasi ini menuntut adanya integrasi kebijakan domestik, seperti moratorium izin baru dan sertifikasi berkelanjutan, dengan regulasi eksternal yang semakin ketat.

Meskipun terdapat berbagai inisiatif, literatur yang ada menunjukkan adanya keterbatasan dalam penelitian lintas negara yang membandingkan secara komprehensif dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada satu isu, misalnya energi terbarukan di Vietnam (Nguyen & Ha, 2023) atau kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia (Manurung et al., 2024), tanpa mengaitkan ketiganya secara terpadu. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana integrasi ESG dapat berjalan efektif di negara berkembang dengan konteks ekonomi politik yang unik.

Literatur yang ada menunjukkan keterbatasan dalam penelitian lintas negara yang membandingkan secara komprehensif dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian sebelumnya lebih banyak terfokus pada satu isu, misalnya energi terbarukan di Vietnam (Nguyen & Ha, 2023), kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia (Manurung et al., 2024), atau tata kelola hutan regional (Vancutsem et al., 2021), tanpa mengaitkan ketiganya secara terpadu. Studi ESG di negara berkembang juga masih dominan berfokus pada perusahaan besar, sementara peran UMKM sebagai aktor penting belum mendapat perhatian memadai. Selain itu, analisis komparatif Indonesia-Vietnam dalam konteks ESG masih sangat terbatas, padahal keduanya memiliki karakteristik ekonomi politik yang serupa namun dengan pendekatan kebijakan yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, menggunakan pendekatan komparatif yang mengintegrasikan tiga dimensi ESG secara bersamaan di dua negara dengan konteks serupa namun strategi berbeda. Kedua, fokus pada lima isu strategis yang saling terkait: transisi energi, EPR, tata kelola hutan, pelaporan global, dan integrasi UMKM. Ketiga, menganalisis pembelajaran lintas negara yang dapat direplikasi di negara berkembang lainnya. Keempat, memberikan perhatian khusus pada peran UMKM dalam implementasi ESG yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik. Kelima, menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis kebijakan domestik dengan dinamika regulasi internasional.

Kesenjangan penelitian ini membuka ruang untuk menganalisis secara lebih mendalam dinamika ESG dengan pendekatan komparatif Indonesia–Vietnam. Rumusan masalah penelitian ini kemudian diarahkan pada lima hal utama. Pertama, bagaimana pelajaran dari percepatan energi surya di Vietnam dapat menjadi referensi dalam memperkuat strategi energi terbarukan Indonesia. Kedua, bagaimana desain kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang efektif di kedua negara dapat mengurangi kebocoran plastik dan meningkatkan nilai ekonomi daur ulang. Ketiga, bagaimana kebijakan domestik dan regulasi internasional, seperti EUDR, memengaruhi tata kelola hutan serta kepatuhan rantai pasok. Keempat, bagaimana standar pelaporan global dan instrumen keuangan berkelanjutan dapat mendorong

transparansi serta mencegah *greenwashing*. Kelima, bagaimana UMKM dapat diintegrasikan sebagai aktor penting dalam implementasi ESG melalui akses pembiayaan, pelaporan yang proporsional, dan keterhubungan dengan pasar global.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menyintesis perkembangan kebijakan dan praktik ESG di Indonesia dan Vietnam, dengan menitikberatkan pada isu energi terbarukan, polusi plastik dan ekonomi sirkular, hutan, serta tata kelola pelaporan. Penelitian ini juga mengulas bukti empiris terbaru mengenai faktor pendorong, hambatan, dan implikasi kebijakan di masing-masing isu. Selain itu, analisis diarahkan pada bagaimana standar global dan instrumen keuangan berkelanjutan memengaruhi perilaku korporasi, lembaga keuangan, dan UMKM. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis pembelajaran lintas negara yang dapat memperkuat kredibilitas implementasi ESG di kedua negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa alasan utama. Pertama, tantangan ESG bersifat lintas batas dan saling memengaruhi, sehingga pembelajaran lintas negara sangat penting untuk menemukan model yang efektif. Indonesia dan Vietnam memiliki karakteristik serupa sebagai negara berkembang dengan kepentingan global dalam rantai pasok komoditas, tetapi kebijakan dan capaian mereka berbeda. Kedua, regulasi internasional yang semakin ketat, seperti EUDR, menuntut kesiapan tata kelola domestik yang lebih baik agar produk dari kedua negara tetap kompetitif di pasar global. Ketiga, isu *greenwashing* menjadi ancaman serius yang dapat melemahkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap implementasi ESG. Dengan menganalisis integrasi ESG di kedua negara, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas keberlanjutan.

Selain urgensi akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur ESG dengan menawarkan kerangka analisis komparatif yang mengintegrasikan tiga dimensi utama secara bersamaan. Penelitian ini memperkaya perspektif tentang bagaimana ESG dapat dipraktikkan di negara berkembang dengan konteks regulasi, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, korporasi, lembaga keuangan, dan UMKM dalam merumuskan strategi keberlanjutan yang lebih efektif. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat kebijakan nasional yang selaras dengan regulasi internasional. Korporasi dan lembaga keuangan dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan ESG dan mencegah *greenwashing*. Sementara itu, UMKM dapat memperoleh wawasan mengenai cara berpartisipasi dalam ekosistem ESG dengan dukungan kebijakan yang inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan Vietnam. Melalui pendekatan komparatif dan analisis integratif, penelitian ini berusaha menjawab tantangan utama dalam implementasi ESG sekaligus memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat transformasi keberlanjutan di tingkat nasional maupun regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif untuk menganalisis dinamika penerapan *environmental, social, and governance (ESG)* di Indonesia dan Vietnam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai proses, kebijakan, dan praktik ESG di kedua negara dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya (Creswell & Poth, 2018). Fokus penelitian diarahkan pada tiga isu utama, yaitu energi terbarukan, polusi plastik dan ekonomi sirkular, serta tata kelola hutan, dengan memperhatikan integrasi aspek sosial UMKM dan tata kelola global.

Data penelitian diperoleh melalui telaah literatur (*desk study*) terhadap regulasi nasional, dokumen kebijakan, laporan keberlanjutan, serta publikasi akademik dan laporan lembaga internasional. Literatur yang dianalisis mencakup publikasi dari jurnal internasional bereputasi, laporan organisasi internasional seperti *World Bank* dan *Global Forest Watch*, serta kebijakan resmi pemerintah Indonesia dan Vietnam. Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama, faktor pendorong, hambatan, serta implikasi kebijakan dari penerapan ESG (Krippendorff, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif lintas negara (*comparative public policy*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan implementasi ESG di Indonesia dan Vietnam (Peters, 2013). Analisis dilakukan dengan mengkaji sejauh mana kebijakan di kedua negara dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global, termasuk standar internasional seperti ISSB S1/S2 dan regulasi EUDR. Validitas penelitian dijaga dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai dokumen kebijakan, publikasi ilmiah, serta laporan organisasi internasional (Flick, 2018). Metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis yang kaya untuk memahami implementasi ESG secara lebih holistik di Indonesia dan Vietnam, sekaligus memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Vietnam muncul sebagai aktor penting yang mencerminkan potensi sekaligus kerentanan negara-negara berkembang. Keduanya memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga berhadapan dengan tantangan yang kompleks, mulai dari degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, hingga keterbatasan kapasitas kelembagaan. Pergeseran kekuatan global membuat negara-negara ASEAN tidak lagi hanya menjadi penerima arus pembangunan dan investasi, melainkan juga pengambil keputusan yang menentukan arah masa depan keberlanjutan dunia.

Indonesia dan Vietnam menghadapi tantangan serupa dalam keberlanjutan seperti deforestasi, sampah plastik, dan inklusi sosial, tetapi dengan modalitas berbeda. Indonesia relatif lebih kuat dalam kerangka regulasi ESG dan keberagaman partisipasi masyarakat, sedangkan Vietnam lebih cepat dalam efisiensi teknis (energi terbarukan, pendidikan). Hasil *literature review* dalam konteks ESG antara Indonesia dan Vietnam menghasilkan analisis terdapat 5 aspek yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan pelajaran transisi energi surya Vietnam bagi Indonesia, desain EPR untuk mengurangi plastik, pengaruh kebijakan domestik dan EUDR terhadap tata kelola hutan, peran standar pelaporan global dalam cegah greenwashing, serta integrasi UMKM melalui pembiayaan, pelaporan proporsional, dan akses pasar.

Analisis Percepatan Pengembangan Tenaga Surya (Energi Terbarukan)

Transisi energi menjadi salah satu tantangan dan peluang terbesar bagi negara berkembang. Vietnam menunjukkan capaian spektakuler dalam percepatan energi surya pada periode 2020–2021. Kebijakan *feed-in tariff* (FiT) yang atraktif berhasil mendorong investasi masif pada pembangkit listrik tenaga surya. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun, kapasitas terpasang energi surya di Vietnam meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, menjadikannya salah satu pasar energi surya dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Nguyen & Ha, 2023). Faktor pendorong keberhasilan tersebut tidak hanya berasal dari FiT yang kompetitif, tetapi juga adanya dukungan kebijakan fiskal dan insentif investasi.

Namun, percepatan yang terlalu cepat juga menghadirkan tantangan besar. Ngo et al. (2024) mencatat terjadinya kelebihan pasokan listrik pada jam-jam tertentu yang tidak mampu diserap oleh jaringan. Akibatnya, perusahaan utilitas mengalami risiko finansial karena harus

menanggung biaya pembelian listrik dari produsen energi surya meskipun kapasitas jaringan tidak mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Vietnam di satu sisi juga menghadirkan pelajaran tentang perlunya keseimbangan antara insentif kebijakan dan kesiapan infrastruktur.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang jauh lebih besar dibanding Vietnam, dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh/m²/hari dan kapasitas teknis mencapai ribuan gigawatt (Hadi et al., 2018). Namun, kontribusi energi surya dalam bauran energi nasional masih sangat kecil, kurang dari 1 persen dari total kapasitas listrik. Hambatan utama terletak pada ketidakpastian regulasi, keterbatasan insentif fiskal, dan kendala teknis dalam pengembangan proyek skala besar.

Tabel 1. Analisis Tantangan Pengembangan Tenaga Surya dan Pembelajaran ESG

Aspek	Indonesia	Vietnam	Sumber
Tantangan	Hambatan regulasi, ketidakpastian kebijakan, keterbatasan insentif fiskal, serta kendala teknis pada proyek skala besar.	Kelebihan pasokan listrik pada jam tertentu; kapasitas jaringan terbatas; risiko finansial utilitas karena harus membeli listrik meski tak terserap.	Ngo et al. (2024); Hadi et al. (2018)
Pembelajaran ESG	Perlu memperkuat tata kelola, transparansi proyek, dan keterlibatan sosial (UMKM, tenaga kerja lokal).	Pentingnya keseimbangan antara kebijakan insentif dan kesiapan infrastruktur; risiko reputasi bila <i>greenwashing</i> terjadi.	Ngo et al. (2024); de Freitas Netto et al. (2020)

Pelajaran dari Vietnam dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk merancang kebijakan insentif yang lebih menarik, namun dengan desain yang memperhatikan kesiapan jaringan dan manajemen risiko keuangan. Penguatan kebijakan tarif listrik terbarukan, insentif pajak, serta skema pembiayaan inovatif melalui *green* sukuk dapat mempercepat penetrasi energi surya di Indonesia. Selain itu, perencanaan sistem transmisi dan distribusi yang terintegrasi dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci untuk menghindari kelebihan pasokan sebagaimana dialami Vietnam. Dari perspektif ESG, transisi energi surya bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait tata kelola. Transparansi dalam perencanaan, akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, serta integrasi aspek sosial seperti keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal akan meningkatkan legitimasi program transisi energi di mata publik dan investor.

Analisis *Extended Producer Responsibility (EPR)* untuk Polusi Plastik

Polusi plastik menjadi salah satu masalah lingkungan paling serius di Indonesia dan Vietnam. Keduanya termasuk dalam lima besar penyumbang sampah plastik laut global (World Bank, 2021; World Bank, 2022). Sistem pengelolaan sampah konvensional terbukti tidak mampu mengatasi kebocoran plastik dari darat ke laut. Oleh karena itu, kebijakan *Extended Producer Responsibility (EPR)* dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menekan kebocoran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daur ulang.

Di Indonesia, peta jalan ekonomi sirkular mulai dikembangkan dengan menempatkan EPR sebagai instrumen utama (Aditya et al., 2025). Produsen diwajibkan bertanggung jawab atas siklus hidup produk mereka, termasuk tahap pascakonsumsi. Implementasi awal dilakukan pada sektor kemasan plastik, meski masih terbatas pada perusahaan besar. Tantangan utama terletak pada kepatuhan pelaku usaha kecil, keterbatasan sistem insentif, dan lemahnya mekanisme pemantauan.

Vietnam juga mulai mengadopsi kebijakan EPR seiring dengan meningkatnya tekanan internasional. Nguyen et al. (2022) menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari daur ulang plastik di Vietnam cukup besar, namun realisasinya masih rendah akibat minimnya infrastruktur daur ulang dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penerapan EPR di Vietnam masih berada pada tahap percontohan, dengan fokus pada sektor minuman dan kemasan sekali pakai.

Tabel 2. Analisis Tantangan dan Pembelajaran ESG dari Implementasi EPR

Aspek	Indonesia	Vietnam	Sumber
Tantangan	Kepatuhan UMKM rendah, keterbatasan insentif, serta lemahnya mekanisme pemantauan.	Minim infrastruktur daur ulang, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan realisasi ekonomi daur ulang masih rendah.	Aditya et al. (2025); Nguyen et al. (2022)
Pembelajaran ESG	Integrasi EPR dengan pelaporan ESG korporasi masih terbatas; perlu mencegah <i>free rider</i> .	Tekanan internasional mendorong percepatan transparansi dan adopsi standar ESG.	de Freitas Netto et al. (2020); Feghali et al. (2025)

Pelajaran penting dari kedua negara adalah perlunya desain EPR yang adaptif. Pertama, EPR harus disertai mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas agar produsen memiliki dorongan kuat untuk berpartisipasi. Kedua, pelibatan UMKM sangat penting, baik sebagai produsen kecil maupun sebagai bagian dari rantai pasok daur ulang. Ketiga, transparansi pelaporan menjadi kunci untuk mencegah *free rider* dan memastikan akuntabilitas.

Secara ESG, kebijakan EPR menghubungkan dimensi lingkungan dengan tata kelola. Dengan tanggung jawab yang diperluas, perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan aspek profit, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari produknya. Indonesia dan Vietnam dapat saling belajar dalam mengembangkan sistem pemantauan EPR berbasis digital, termasuk integrasi dengan pelaporan ESG perusahaan.

Analisis Tata kelola Hutan dan Rantai Pasok

Hutan tropis Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam rantai pasok global, khususnya terkait komoditas seperti kayu, kopi, karet, dan kelapa sawit (Afandi et al., 2024; Pambudi & Pramujo, 2022). Namun, tekanan deforestasi masih tinggi, terutama di Indonesia. Makhdalena et al. (2023) menunjukkan bahwa ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan menjadi penyebab utama kehilangan hutan. Meski kebijakan moratorium izin baru dan sertifikasi berkelanjutan telah memperlambat laju deforestasi, kantong-kantong deforestasi tetap ada (Global Forest Watch, 2025).

Di Vietnam, deforestasi relatif lebih terkendali, tetapi tetap menjadi isu akibat tekanan ekspansi pertanian dan kebutuhan energi biomassa. Vancutsem et al. (2021) menegaskan bahwa perubahan tutupan hutan di Vietnam cenderung stabil, namun risiko meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan.

Konteks global memperumit persoalan ini. Regulasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang berlaku sejak 2023 mewajibkan semua produk komoditas yang masuk ke pasar Eropa bebas dari deforestasi. Hal ini menuntut negara eksportir, termasuk Indonesia dan Vietnam, untuk memperkuat sistem pemantauan, sertifikasi, dan penegakan hukum. Kebijakan domestik seperti sertifikasi sukarela (*Forest Stewardship Council*, ISPO,

dan lainnya) perlu diharmonisasikan dengan regulasi internasional. Pendekatan yurisdiksional juga menjadi pilihan untuk memastikan kepatuhan lintas rantai pasok. Dalam konteks ESG, tata kelola hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola korporasi dan akses pasar internasional. Indonesia dan Vietnam memiliki peluang untuk memperkuat posisi mereka dengan mengembangkan sistem transparansi berbasis teknologi, seperti pemantauan hutan satelit dan *blockchain* untuk rantai pasok. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap EUDR sekaligus memperkuat reputasi ESG di mata global.

Tabel 3. Analisis Tantangan dan Pembelajaran ESG dari Implementasi Tata Kelola Hutan dan Rantai Pasok

Aspek	Indonesia	Vietnam	Sumber
Tantangan	Tekanan deforestasi tinggi akibat ekspansi sawit dan industri ekstraktif; sertifikasi ISPO belum diakui global; keterbatasan teknologi monitoring dan keterlibatan UMKM rendah.	Deforestasi relatif terkendali namun terancam ekspansi pertanian dan energi biomassa; sertifikasi FSC lebih dominan; keterbatasan infrastruktur pemantauan dan koordinasi nasional.	Makhdalena et al. (2023); Vancutsem et al. (2021); Global Forest Watch (2025); European Commission (2023)
Pembelajaran ESG	Moratorium izin baru memperlambat laju deforestasi; peluang adopsi blockchain dan pemantauan satelit; integrasi UMKM ke rantai pasok hijau masih dapat diperkuat.	Stabilitas relatif hutan menunjukkan manfaat regulasi proaktif; peluang harmonisasi sertifikasi FSC dengan mekanisme nasional; transparansi rantai pasok masih bisa ditingkatkan.	Global Forest Watch (2025); FSC; ISPO; de Freitas Netto et al. (2020); Feghali et al. (2025)

Analisis Pelaporan ESG dan Keuangan Berkelanjutan

Pelaporan keberlanjutan menjadi dimensi penting dalam ESG. Namun, praktik *greenwashing* masih menjadi tantangan serius. de Freitas Netto et al. (2020) menekankan bahwa *greenwashing* melemahkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap komitmen keberlanjutan. Feghali et al. (2025) menambahkan bahwa regulasi anti-*greenwashing* diperlukan untuk memperkuat kredibilitas ESG.

Indonesia telah lebih maju dalam hal instrumen keuangan berkelanjutan. Penerbitan green sukuk sejak 2018 menjadikannya pelopor global. Instrumen ini tidak hanya membiayai proyek hijau, tetapi juga meningkatkan reputasi Indonesia di pasar keuangan internasional (Daniela et al., 2022). Sementara itu, Vietnam masih dalam tahap awal, dengan keterlibatan terbatas pada sektor perbankan dan perusahaan besar.

Tabel 4. Analisis Tantangan dan Pembelajaran ESG terkait Pelaporan dan Keuangan Berkelanjutan

Aspek	Indonesia	Vietnam	Sumber
Tantangan	Lebih maju secara regulasi (POJK 51/2017, THI 2022, green sukuk sejak 2018), tetapi menghadapi risiko <i>greenwashing</i> dan belum seragamnya standar pelaporan lintas sektor.	Praktik pelaporan ESG masih terbatas pada perusahaan besar; UMKM kesulitan memenuhi standar; keterlibatan sektor keuangan masih tahap awal.	Daniela et al. (2022); Manurung et al. (2024); Lestari et al. (2025); Uong & Nguyen (2025)
Pembelajaran ESG	Instrumen seperti green sukuk meningkatkan kredibilitas global; Taksonomi Hijau membantu klasifikasi ekonomi hijau; peluang memperluas keterlibatan UMKM melalui skema pembiayaan inklusif.	Dorongan investor asing memacu pengungkapan ESG; peluang memperluas cakupan pelaporan dengan adaptasi ISSB S1/S2 dan dukungan kapasitas bagi UMKM.	Daniela et al. (2022); Lestari et al. (2025); Uong & Nguyen (2025); Feghali et al. (2025)

Standar pelaporan global seperti ISSB S1/S2 berpotensi menjadi *game changer*. Standar ini mendorong perusahaan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan secara lebih terintegrasi. Bagi Indonesia dan Vietnam, adopsi standar ini dapat memperkuat kredibilitas pelaporan, meningkatkan daya tarik investasi, dan mengurangi risiko *greenwashing*.

Namun, tantangan terletak pada kesiapan perusahaan, terutama UMKM, untuk memenuhi standar pelaporan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan proporsional yang tidak membebani pelaku usaha kecil. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan dan pemerintah sangat penting untuk menyediakan panduan teknis dan dukungan kapasitas.

Analisis Integrasi UMKM dalam Implementasi ESG

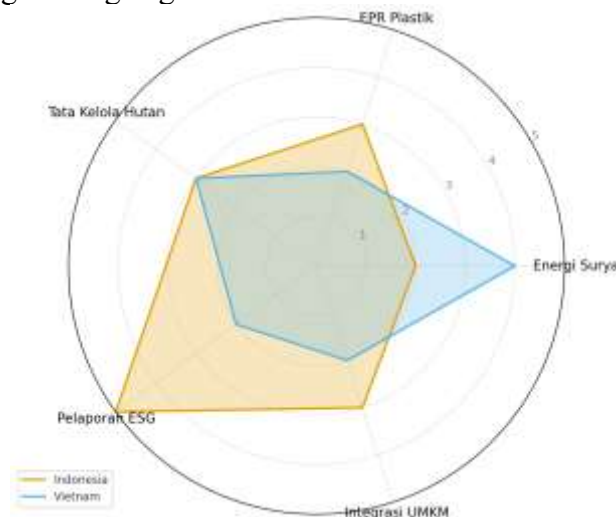
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan Vietnam, dengan kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan PDB. Namun, keterlibatan UMKM dalam implementasi ESG masih sangat terbatas. Uong & Nguyen (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas internal, akses pembiayaan, dan rendahnya tekanan eksternal menjadi hambatan utama bagi UMKM di Vietnam. Di Indonesia, kondisi serupa juga terlihat, meski terdapat inisiatif pembiayaan hijau oleh perbankan (Manurung et al., 2024).

Integrasi UMKM dalam kerangka ESG memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, akses pembiayaan hijau perlu diperluas melalui instrumen keuangan inklusif seperti kredit hijau bersubsidi dan dukungan *blended finance*. Kedua, pelaporan ESG untuk UMKM perlu dirancang proporsional dan sederhana agar dapat diimplementasikan tanpa membebani. Ketiga, konektivitas UMKM ke pasar global dapat diperkuat melalui sertifikasi keberlanjutan yang sesuai dengan kapasitas mereka.

Tabel 5. Analisis Tantangan dan Pembelajaran ESG terkait Integrasi UMKM dan Implementasi ESG

Aspek	Indonesia	Vietnam	Sumber
Tantangan	UMKM mendominasi ekonomi nasional, tetapi keterlibatan dalam ESG masih rendah; kendala utama berupa keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas pelaporan, dan literasi keberlanjutan.	UMKM menghadapi hambatan serupa, terutama keterbatasan internal dan rendahnya tekanan eksternal untuk menerapkan pelaporan ESG; keterlibatan dalam rantai pasok global masih minim.	Manurung et al. (2024); Uong & Nguyen (2025)
Pembelajaran ESG	Program pembiayaan hijau oleh bank BUMN memberi peluang memperluas keterlibatan UMKM; perlu pengembangan skema pelaporan proporsional agar UMKM tidak terbebani.	Pengungkapan ESG di UMKM dapat diperluas melalui <i>coaching clinic</i> dan dukungan teknis; adopsi ISSB S1/S2 dapat dirancang lebih sederhana untuk skala usaha kecil.	Manurung et al. (2024); Uong & Nguyen (2025); Lestari et al. (2025)

Dalam perspektif ESG, keterlibatan UMKM memperkuat dimensi sosial dan meningkatkan legitimasi keberlanjutan. UMKM dapat menjadi agen perubahan dalam rantai pasok hijau sekaligus penerima manfaat dari kebijakan keberlanjutan. Dengan demikian, integrasi UMKM tidak hanya memperluas cakupan ESG, tetapi juga memastikan keberlanjutan yang lebih inklusif. Radar *chart* berikut menggambarkan posisi relatif Indonesia dan Vietnam dalam lima isu ESG utama berdasarkan analisis komparatif. Skala 1–5 digunakan untuk menilai kekuatan relatif masing-masing negara.



Gambar 1. Visualisasi Radar Chart ESG Indonesia–Vietnam

Analisis perbandingan ini mengungkapkan bahwa keberhasilan ESG memerlukan perpaduan antara kebijakan dalam negeri yang solid, penyelarasan dengan aturan internasional, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk UMKM. Melalui penerapan pembelajaran antarnegara, Indonesia dan Vietnam berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap praktik ESG mereka, sekaligus menjadi teladan bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mewujudkan keberlanjutan yang merata dan inklusif.

Tabel 6. Analisis Komparatif Indonesia dan Vietnam Berbasis Rumusan Masalah

Isu Utama	Indonesia	Vietnam	Analisis Komparatif
Energi Surya	Potensi teknis sangat besar (4,8 kWh/m ² /hari), namun kontribusi <1% dalam bauran energi; terhambat ketidakpastian regulasi dan insentif fiskal terbatas (Hadi et al., 2018).	Akselerasi besar pada 2020–2021 berkat kebijakan feed-in tariff; kapasitas PV surya melonjak tajam; menghadapi risiko kelebihan pasokan dan beban utilitas (Nguyen & Ha, 2023; Ngo et al., 2024).	Indonesia perlu meniru insentif atraktif Vietnam, namun harus memastikan kesiapan jaringan dan mitigasi risiko keuangan.
<i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i>	Peta jalan ekonomi sirkular telah disusun; implementasi awal pada sektor kemasan; tantangan kepatuhan UMKM dan lemahnya mekanisme pemantauan (Aditya et al., 2025).	Kebijakan EPR mulai diperkenalkan, masih tahap percontohan; potensi daur ulang besar, tetapi infrastruktur dan koordinasi kelembagaan terbatas (Nguyen et al., 2022; World Bank, 2022).	Keduanya perlu memperkuat sistem insentif dan pemantauan. Indonesia lebih maju secara kebijakan, Vietnam masih tahap awal.
Tata Kelola Hutan dan Rantai Pasok	Deforestasi tinggi akibat ekspansi sawit dan industri ekstraktif; moratorium izin baru dan sertifikasi ISPO telah memperlambat laju; tetap ada kantong deforestasi (Makhdalena et al., 2023; Global Forest Watch, 2025).	Deforestasi lebih kecil skalanya; tekanan ekspansi pertanian dan energi biomassa; relatif stabil, tetapi berisiko meningkat (Vancutsem et al., 2021).	Kebijakan EUDR mendorong harmonisasi standar global. Indonesia menghadapi risiko reputasi lebih besar karena ekspor sawit, Vietnam lebih terdorong oleh ekspor kayu dan kopi.
Pelaporan ESG & Keuangan Berkelanjutan	Lebih maju: POJK 51/2017, Taksonomi Hijau 2022, green sukuk sejak 2018 (Daniela et al., 2022). Tantangan:	Masih akselerasi; praktik pelaporan terbatas pada perusahaan besar; tekanan investor asing mendorong peningkatan	Indonesia unggul dalam instrumen keuangan berkelanjutan; Vietnam perlu memperluas pelaporan ESG di sektor UMKM.

Isu Utama	Indonesia	Vietnam	Analisis Komparatif
	risiko greenwashing, standar belum seragam.	transparansi (Uong & Nguyen, 2025).	
Integrasi UMKM dalam ESG	Keberadaan UMKM mendominasi perekonomian; keterlibatan masih rendah karena keterbatasan kapasitas dan akses pembiayaan; ada inisiatif pembiayaan hijau perbankan (Manurung et al., 2024).	Usaha UMKM menghadapi hambatan serupa; keterbatasan internal dan rendahnya tekanan eksternal (Uong & Nguyen, 2025).	Kedua negara perlu sistem pelaporan proporsional dan dukungan pembiayaan inklusif agar UMKM bisa berpartisipasi dalam ESG.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berbasis tabel tersebut, diketahui bahwa Indonesia lebih unggul dalam aspek regulasi keuangan berkelanjutan dan instrumen pasar (*green* sukuk, taksonomi hijau), sementara Vietnam lebih menonjol dalam keberhasilan transisi energi surya melalui kebijakan insentif. Dalam isu EPR, kedua negara masih mencari model efektif, meski Indonesia sedikit lebih maju pada aspek kebijakan. Dalam tata kelola hutan, Indonesia menghadapi tantangan reputasi yang lebih besar karena perannya sebagai eksportir minyak sawit utama dunia, sedangkan Vietnam menghadapi tekanan dari ekspor kayu dan kopi. Dari sisi pelaporan, Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih matang, sedangkan Vietnam masih dalam tahap awal, meski terdapat dorongan signifikan dari investor asing. Terakhir, pada dimensi sosial, UMKM di kedua negara menghadapi hambatan serupa sehingga diperlukan strategi inklusif, baik melalui pembiayaan hijau maupun pelaporan yang proporsional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti lima temuan utama dari perbandingan penerapan ESG di Indonesia dan Vietnam beserta rekomendasi kebijakannya. Pertama, dalam transisi energi, Indonesia dapat belajar dari lonjakan kapasitas surya Vietnam yang didorong feed-in tariff, namun harus menghindari risiko boom-bust dengan investasi paralel pada jaringan dan penyimpanan energi, termasuk melalui kolaborasi bilateral berbasis ASEAN. Kedua, kedua negara perlu menyelaraskan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) dengan membentuk task force lintas batas untuk harmonisasi standar kemasan, pelaporan, dan perdagangan kredit daur ulang. Ketiga, dalam tata kelola hutan, diperlukan pusat kepatuhan EUDR regional dan kolaborasi seperti province twinning untuk integrasi data spasial guna memenuhi regulasi internasional. Keempat, untuk mencegah greenwashing, Indonesia dan Vietnam disarankan membentuk gugus kerja adopsi standar pelaporan global ISSB S1/S2 dan membangun data utility ESG regional. Kelima, UMKM sebagai aktor kunci memerlukan dukungan khusus melalui program pemasok hijau bersama, voucher audit, dan pembiayaan berbasis kinerja agar dapat berintegrasi ke dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kuantitatif guna mengukur dampak empiris dari rekomendasi kebijakan tersebut, serta memperluas cakupan analisis dengan

memasukkan negara ASEAN lainnya untuk mendapatkan perspektif regional yang lebih komprehensif tentang implementasi ESG.

REFERENSI

- Aditya, R., Sari, P., & Wibowo, A. (2025). Circular economy roadmap for plastic waste management in Indonesia. *Journal of Environmental Policy and Management*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.1016/j.jeppman.2025.01.004>
- Afandi, F., Suryaningtyas, P., & Feryanto, F. (2024). Strategi perkebunan Indonesia dalam menghadapi EUDR. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 6(3), 922–928. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0603.922-928>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daniela, F., Prasetyo, H., & Rahman, A. (2022). Sustainable finance and ESG implementation in Indonesia's domestic market. *Sustainability*, 14(19), Article 12045. <https://doi.org/10.3390/su141912045>
- de Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B., & Soares, G. R. da L. (2020). Concepts and forms of greenwashing: A systematic review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1), Article 19. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-0300-3>
- Feghali, K., Barakat, S., & Mounir, L. (2025). Anti-greenwashing regulation and ESG reporting credibility. *Journal of Sustainable Finance*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/20430795.2025.110532>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Global Forest Watch. (2025). *Deforestation data and insights 2001–2024*. <https://www.globalforestwatch.org>
- Hadi, S., Widyawan, B., & Kusumastuti, R. (2018). Renewable energy policy challenges in Indonesia. *Energy Policy*, 121, 567–574. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.033>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Lestari, D., Nurhayati, S., & Putra, M. (2025). ESG adoption among Indonesian listed companies: Challenges and opportunities. *Journal of Asian Business and Economics*, 17(3), 245–268. <https://doi.org/10.1080/12299493.2025.178902>
- Makhdalena, S., Yusuf, F., & Hendarto, D. (2023). Deforestation and expansion of extractive industries in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 150, Article 102973. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102973>
- Manurung, R., Santosa, J., & Wijaya, L. (2024). State-owned banks and sustainable lending in Indonesia. *Asian Finance Review*, 36(2), 211–229. <https://doi.org/10.1080/12265632.2024.113344>
- Ngo, T., Tran, P., & Le, H. (2024). Vietnam's solar PV boom: Policy incentives, grid integration, and financial risks. *Renewable Energy*, 215, 125–137. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.01.092>
- Nguyen, T., & Ha, V. (2023). Accelerating energy transition in Vietnam: Photovoltaic development and challenges. *Energy Studies Review*, 31(4), 401–420. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.103482>
- Nguyen, V., Tran, D., & Le, Q. (2022). Circular economy potential for plastic waste management in Vietnam. *Waste Management*, 145, 221–233. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.01.032>
- Nugroho, B. A., & Daspar, D. (2025). Analisis peluang dan ancaman/tantangan perdagangan produk perkebunan (Studi kasus pada perdagangan Indonesia dan Vietnam). *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 520–527.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5524>
- Pambudi, A. S., & Pramujio, B. (2022). Cross-generation agrarian conflict in Indonesia's palm land. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT)* (pp. 828–836). Atlantis Press.
https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_110
- Peters, B. G. (2013). *Comparative politics: Theory and methods*. NYU Press.
- Uong, T., & Nguyen, H. (2025). ESG disclosure practices among SMEs in Vietnam: Drivers and barriers. *Journal of Small Business and Sustainability*, 13(2), 89–106.
<https://doi.org/10.1080/25731232.2025.112345>
- Vancutsem, C., Achard, F., Pekel, J. F., Vieilledent, G., Carboni, S., Simonetti, D., & Gallego, J. (2021). Long-term forest cover change dynamics in the tropics. *Nature Sustainability*, 4(9), 845–852. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00775-y>
- World Bank. (2021). *Plastic waste discharges from rivers and coastlines in Indonesia*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/plastic-waste-discharges-from-rivers-and-coastlines-in-indonesia>
- World Bank. (2022). *Plastic pollution diagnosis and circular economy options for Vietnam*. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/b3f0fc66-a0f7-56fb-a231-09915a06f8fc>